

## KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT\*

Oleh Ashadi Siregar

( 1 )

Masalah kebebasan berserikat dan berpendapat tidak terlepas dari interaksi masyarakat dan birokrasi negara. Kebebasan adalah kondisi yang diperlukan masyarakat, bukan birokrasi negara. Birokrasi negara menjalankan kekuasaan.

Makna kebebasan pada dasarnya bersifat imperatif, sesuai dengan paradigma yang mendasari sistem sosial. Makna ini dilihat dari kehidupan empiris, bukan dari nilai-nilai normatif, apalagi dari dunia alam pikiran yang dibunyikan secara verbal. Secara sederhana makna imperatif ini dapat disebut sebagai kebudayaan (dalam arti luas), sebagai acuan dalam seluruh tindakan individu maupun gerak institusional.

Dalam polaritasnya paradigma dilihat sebagai: humanisme yang memberi penghargaan kepada nilai humanisme yang melekat secara azasi pada individu, atau komunisme yang memberi penghargaan kepada nilai kolektif yang melekat pada negara. Polaritas lainnya: apakah masyarakat sebagai kumulasi dari individu-individu manusia, atau masyarakat diwujudkan dalam negara.

Dari masing-masing paradigma akan lahir berbagai jalan dalam mewujudkan tujuan politik dan ekonomi. Libertarianisme atautkah otoritarianisme dalam politik; dan kapitalisme atautkah komunisme dalam ekonomi.

Secara sederhana seluruh kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sbb:

	POLITY I	POLITY II
PARADIGMA	Asas humanisme masyarakat	Kolektivisme negara
JALAN POLITIK	Libertarianisme	Otoritarianisme
JALAN EKONOMI	Ekonomi pasar	Ekonomi negara
	Kapitalisme	Komunisme

Masing-masing polity ini dengan sendirinya akan menetapkan makna imperatif yang berbeda dari kebebasan berserikat dan berpendapat untuk warganya. Jika antara paradigma ke jalan politik dan ekonomi bertolak bersifat garis lurus, maka warga berada dalam kejelasan nilai.

( 2 )

Belajar dari sejarah peradaban umat manusia modern (setelah PD I) penyakit-penyakit kehidupan kenegaraan agaknya dapat dilihat berasal dari penyimpangan antara paradigma dengan jalan politik atau ekonomi.

Negara fasis Jerman, Italia, dan Jepang setelah PD I, membangun negara dengan menggunakan paradigma kolektivisme negara, jalan politik otoritarianisme dan jalan ekonomi kapitalisme.

Secara formal, setelah PD II, tidak ada lagi negara anti komunis yang secara telanjang menggolongkan paradigma sosialnya ke dalam kolektivisme negara. Setelah PD II, hanya negara USSR yang bertahan dengan kolektivisme negara, jalan otoritarianisme dan komunisme. Tetapi dengan revolusi Gorbachev, seluruh tatanan ini diganti kepada humanisme, libertarianisme dan kapitalisme.

Apakah manusia di muka bumi akan berada dalam satu acuan nilai seperti yang diimpikan Gorbachev? Yang jelas, cara melihat polity agaknya tidak dari paradigma ke jalan

---

\* Disampaikan pada *Pertemuan Forum LSM/LPSM*, Forum LSM/LPSM Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta 2 Agustus 1995

ekonomi, tetapi sebaliknya. Jalan kapitalisme mungkin akan "memaksa" jalan politik kepada libertarianisme, dan barulah kemudian terbentuk paradigma humanisme yang azasi.

( 3 )

Peradaban umat manusia bergerak kepada terbentuknya polity tipe II. Dalam polity tipe I, berbagai institusi masyarakat seperti pers, hanya dapat berfungsi atas dasar adanya kebebasan berserikat dan berpendapat. Kebebasan ini di satu pihak adalah ruang gerak (eksternal), dan di pihak lain adanya dinamika otonom (internal). Kebebasan pers merupakan kondisi bersifat eksternal dan internal. Kondisi eksternal sejauh mana negara dan masyarakat memberi ruang gerak bagi institusi pers menjalankan fungsinya. Kondisi internal sejauh mana sistem di dalam organisasi pers menggunakan otonominya, untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Jalan ekonomi kapitalisme modern "memaksa" jalan politik berdasarkan libertarianisme. Kecuali birokrasi negara bersikap ortodoks, berusaha menahan dinamika ini dengan memaksakan kolektivisme negara dan otoritarianisme.

( 4 )

Dengan cara lain, kebebasan berserikat dan berpendapat dapat dilihat dari dua sisi, pertama, kondisi yang diberikan oleh kekuasaan (birokrasi) negara kepada masyarakat, atau kedua, kondisi yang menjadi prasyarat dalam kehidupan polity (birokrasi dan masyarakat negara).

Kondisi pertama, yang diberikan kekuasaan bersifat pragmatis, bertolak dari orientasi teknis dari penyelenggaraan birokrasi negara; atau bahkan bertolak dari kecenderungan individual jika penyelenggaraan birokrasi adalah perluasan (extended) dari ranah personal (personal domain) pejabat negara. Kondisi bersifat subyektif ini sepenuhnya dibaca dari pernyataan, imbauan bahkan dugaan atas itikad dari pejabat negara.

Kondisi kedua, jika birokrasi dan masyarakat menggunakan acuan nilai yang sama tentang batas kekuasaan birokrasi di satu pihak dan batas kebebasan masyarakat. Acuan nilai selalu bersifat normatif, dan berbunyi ideal, seperti dalam konstitusi. Tetapi normatif-konstitusional masih harus diwujudkan secara empiris, sehingga menjadi nilai sosial.

Setiap keputusan birokrasi negara di satu pihak, dan respon masyarakat di pihak lain, merupakan penafsiran atas nilai. Proses diharapkan bersifat konsisten, sehingga nilai sosial dari kebebasan masyarakat dapat semakin terwujud secara empiris sebagai nilai sosial.